

LAGU KEBANGSAAN

Keberpihakan pada Rakyat adalah Panggilan Intelektual dan Hati :

Pergumulan Prof HAKA dalam Ranah Teori Pengetahuan (*Epistemologi*) dan Praksis Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Oleh: Ismatul Hakim

Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih karena diminta untuk membedah buku Prof Haryadi Kartodiharjo (HAKA) yang sangat luarbiasa ini. Prof HAKA adalah sedikit intelektual yang mampu bertahan dan tidak mengalami problem defisit dan pendangkalan pengetahuan atau banalitas oleh semakin merebaknya *profanisme sebagai dampak tindak* dan budaya *pragmatisme*, sehingga mampu membaca fenomena dan realitas sosial dengan ketajaman dan kejernihan berpikir dan pengetahuannya.

Sebetulnya saya kaget ketika diminta oleh mas Eko Cahyono untuk membahas buku *Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan denga sub Judul "73 Esai Esai Reflektif Dalam Kuasa Pengetahuan Politik PSDA dan Problematika Kebijakan"*. Sebab, Prof HAKA adalah seorang intelektual zaman now yang selalu menjadi rujukan bagi tidak saja aktivis dan akademisi tetapi juga para pengambil kebijakan, utamanya di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Indonesia.

Sebelum masuk ke inti dari buku, saya akan mengawalinya dengan sedikit membahas *Stanza Lagu Indonesia Raya*, karya besar anak bangsa WR Supratman. Sebab, dalam benak saya beragam pertanyaan muncul manakala melihat karya

LAGU KEBANGSAAN

WR Supratman menjadi *cover* dalam buku ini. Apa sebenarnya relevansi makna dari stanza tersebut dengan ragam tulisan yang ada di buku Prof HAKA? Mengapa Prof HAKA lebih memilih stanza Indonesia Raya ketimbang ragam lagu perjuangan lainnya?

WR Supratman adalah pengarang lagu yang tidak sembarangan dan tentunya semua orang tahu itu. Betapa tidak? Semua gejolak dan nafas perjuangan bangsa Indonesia mampu di refleksikan dan di-representasikan dalam bait-bait lirik lagu Indonesia Raya yang penuh makna, terutama filosofis dan ideologis Indonesia sebagai *nation state*. Dimensi lagu Indonesia Raya (Stanza) tidaklah tunggal hanya merefleksikan dalam satu periode perjuangan bangsa tetapi berdimensi luas dan futuristik, mengimajinasikan bahwa perjuangan melawan kolonialisme barulah awal dari fase panjang perjuangan bangsa. Tampaknya pengarang lagu ini tahu bahwa justru periode perjuangan terberat adalah pada era panjang paska kemerdekaan manakala bangsa ini memasuki era kapitalisme lanjut, era paska modernitas dan era paska kebenaran (*post truth*). Saya pikir tidaklah berlebihan bila WR Supratman disejajarkan dengan Ronggo Warsito atau Jangka Jayabaya yang bisa meramal masa depan dan Alfin Toffler dengan Future Shock dalam the Third Wave-nya (1970) dan John Naisbitt dan istrinya, Patricia Abuderne, dalam buku mereka, Mega Trend 2000 (1991).

Esensi dari lirik Stanza Indonesia Raya sesungguhnya merupakan dorongan semangat membangun secara fisik maupun penguatan pengetahuan dan semangat perjuangan ideologis seperti tercermin dalam lirik *bangunlah jiwanya, bangunlah badannya*. Semangat perjuangan ideologis ini bukanlah sesuatu yang

LAGU KEBANGSAAN

utopis, karena bangsa ini telah dimodali aset produktif yang luar biasa luas dan kaya akan potensi ekonomi, sosial dan ekologisnya. Tanah adalah bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat tetapi basis perjuangan ideologis bangsa di kancah pertarungan fisik, politik dan kontestasi narasi kuasa pengetahuan, baik di tingkat lokal, nasional dan global.

Kita sangat bersyukur dan beruntung punya Prof HAKA yang berani mencoba menarik basis filosofis stanza Indonesia Raya dalam serangkaian karya-karya terseraknya menjadi suatu karya agung yang bermanfaat bagi kita semua. Saya sebut karya agung karena karya-karya Prof HAKA ini merupakan hasil dari proses dialektika yang panjang dan mengakar dalam ranah agraria, tata ruang, kawasan hutan dan lingkungan hidup baik dalam posisinya sebagai intelektual maupun aktivis yang tidak hanya bergulat di ranah filosofis teoritik tetapi juga di ranah praksis.

Bagi saya, Prof HAKA adalah sosok ilmuwan yang tidak ingin membangun rumah di atas *angin*, dan tidak ingin meninggalkan filosofi stanza yang abstract tetap di tataran abstraksi, tetapi beliau ingin menarik makna filosofis tersebut ke tataran yang lebih konkrit *vice versa* agar publik luas paham tanpa meninggalkan kesakralan makna filosofisnya.

Titik tekan buku ini adalah tentang korupsi, birokrasi, peran pengetahuan, politik kebijakan, serta argumen-argumen perbaikan yang diperlukan ke depan. Buku ini berisi perbincangan penulis di seputar perjalanannya untuk mendapatkan sebuah titik puncak kebenaran (*thariqah al haq*) berupa potret pemikiran tentang SDA

LAGU KEBANGSAAN

dan LH (dalam budaya santri di lingkungan Nahdlatul Ulama dikenal dengan *tashwirul afkar*) dalam dua tahun terakhir. Tidak banyak ilmuwan atau ulama yang bertahan dengan kekuatan spiritualismenya dan tidak turut hanyat dalam gelombang lautan materialisme. Manusia macam ini yang disebut sebagai lentera kehidupan rakyat.

Masih ada simpul-simpul pemikiran maju dan pemikir kritis yang senior maupun yang baru muncul dari kalangan agamawan, budayawan dan kaum intelektual yang tersebar di berbagai stakeholder kelembagaan pembangunan di negeri kita seperti Emha Ainun Najib, KH. Ir. Solahuddin Wahid (Gus Solah), KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), Prof Dr. Machfud MD, Dr. Gunawan Wiradi, Dr. Shohibuddin, Ustad Abdul Shomad (UAS), Ustad Adi Hidayat (UAH), Fran Magnis Suseno, Dr. Rizal Ramli, Romo Sandyawan, Dr. Refli Harun, Dr. Yudi Latief dan lainnya yang merupakan simpul pencerahan untuk perubahan bagi masa depan bangsa. Rekrutmen kepemimpinan berdasar pada kepentingan politik dan kekuasaan akan semakin membuat kita kehilangan cahaya kepemimpinan di era perubahan iklim politik saat ini.

Prof HAKA dapat dikategorikan manusia langka untuk di lingkungan pendidikan dan birokrasi karena bergerak dalam ruang lingkup kekakuan birokrasi pemerintahan dan kelompok masyarakat sipil (CSO). Di era ini peran CSO sudah begitu nyata sebagai penggerak dan pembawa perubahan di birokrasi, disamping aktor-aktor CSO-nya sendiri berada dalam arus gelombang perubahan yang sama. Pertemuan antar para pemikir dan pembawa perubahan inilah yang harus difasilitasi merumuskan kembali garis besar haluan dalam tata kelola SDA dan Lingkungan Hidup yang mewakili berbagai kalangan kekuatan di masyarakat.

LAGU KEBANGSAAN

Saya membaca bahwa buku ini ingin mengingatkan kita semua bahwa sampai saat ini praktek pengelolaan SDA dan lingkungan sudah jauh menabrak makna stanza baik stanza 1, 2 dan 3 yang berakibat pada beragam krisis akut, seperti krisis ekologi, sosial dan ekonomi, moralitas dan ideologis.

Namun, Prof HAKA mengingatkan bahwa titik puncak pengaturan pengelolaan SDA bukanlah ada di pundak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan Parlemen tetapi ada pada *the voters* atau rakyat seperti diutarakan oleh Franklin Roosevelt. Mengapa Prof HAKA mengutip kata-kata filosofis dari Roosevelt? Saya melihat bahwa Prof HAKA ingin mengingatkan kita bahwa penguasa puncak sesungguhnya adalah rakyat itu sendiri. Saya menangkap bahwa sebenarnya Prof HAKA juga sedang galau, merasa sendirian dalam arena pertarungan kuasa pengetahuan dan praksis yang telah terkooptasi dan terkontaminasi oleh kebenaran pengetahuan manipulatif. Dengan kutipan tersebut, sebenarnya Prof HAKA ingin mengajak kita semua untuk berani bertindak, masuk dalam arena kontestasi pengetahuan dan praksis dengan posisi keberpihakan yang jelas.

Pembelokan arah ideologi pembangunan yang merusak tata pengurusan SDA dan LH oleh kuasa pengetahuan dan praksis yang koruptif akan semakin membahayakan manakala kita tidak peduli dan membiarkan proses pembusukan tersebut semakin jauh terjadi.

Caranya bagaimana? Dalam buku ini, Prof HAKA menawarkan beragam jalan diantaranya adalah patologi institusi seperti korupsi, harus diamputasi agar tidak menjalar sampai ke nadi dan jantung bangsa ini. Kemudian membangun

LAGU KEBANGSAAN

kepemimpinan baru dengan mempromosikan sekelompok kecil pemimpin yang berani, bersih dan akuntabel. Mempromosikan sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan akuntabilitas, membatasi monopoli otoritas dan sekaligus mempersempit ruang deskresi.

Langkah lain adalah merekonstruksi moral sosial dan rasionalitas baru di ruang publik yang telah terkooptasi oleh hegemoni produksi narasi narasi pengetahuan *post-truth politics*, seperti *fake news*, dan opini tanpa landasan fakta yang kuat, yang membodohi publik sekaligus membenarkan perilaku korupsi dan meruntuhkan kredibilitas institusi pemberantas korupsi.

Di era *post-truth politics*, Ralph Keyes (2004) mengingatkan bahwa orang dengan mudah mengambil data manapun dan membuat kesimpulan sendiri dan tafsir sendiri sesuai keinginannya, fakta dimanipulasi dan akhirnya diakui sebagai kebenaran pengetahuan. Demikian juga dalam pengelolaan SDA dan LH ada kecenderungan hegemoni tafsir yang hanya berlandaskan pada data manipulatif dan *fake* sehingga secara esensi pengelolaan SDA dan LH menjadi rapuh.

Dari problematika masalah, dan fakta lapangan sebagaimana dimuat dalam 73 esai esai Prof HAKA berupa dinamika kehidupan masyarakat beserta kerusakan SDA dan lingkungan ekosistem akibat tumpulnya birokrasi dan praktek korupsi, maka saya menyarankan beberapa hal sebagai alternatif bagi masa depan pengelolaan SDA dan LH sambil menjawab kegalauan dari buku Prof HAKA ini.

LAGU KEBANGSAAN

Pertama, paradigma pendidikan sebagai sarana pembelajaran untuk menciptakan anak didik/mahasiswa untuk siap tahu, harus dikembalikan menjadi siap tempur atau siap pakai. Model pendidikan vokasional dan berkeahlian dengan prinsip sesingkat mungkin orang menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal, informal ataupun non-formal sebanyak mungkin dia bisa mendapatkan keahlian untuk bisa mandiri, berdaya saing dan inovatif. Membangun hutan dan pertanian harus menjadi moral dan peradaban baru generasi anak-anak berpendidikan, bukan sekedar mewacanakan hutan lindung, hutan konsevasi atau hutan kota dsb. Percuma juga kalau kita membangun reforma agraria apabila kepemimpinan nasional tidak menjadikan negara agraris sebagai visi utamanya, dengan mencontohkan diri kepemimpinan membangun kembali hutan dengan mengurus tanaman dan pohon-pohon mulai dari benih hingga dapat dipanen. Petani baik untuk pangan, sayuran, buah-buahan dan perkebunan adalah muara kebijakan pembangunan bangsa. Politik pembangunan harus dapat meng-*anak emas*-kan mereka, bukan mengorbankan mereka. Apalagi seorang rimbawan harus dapat membangun hutan, bukan hanya memuji-muji hutan rimba saja.

Segala urusan regulasi, penganggaran (*budgeting*) dan pengawasan pembangunan dilakukan secara seimbang dan profesional oleh kalangan eksekutif dan legislatif harus mengarah kepada penguatan visi negara agraris. Siapa yang melakukan korupsi atau manipulasi dan bermain kucing-kucingan akan menjadi pengetahuan publik. Lahan hijau, lahan menjadi berfungsi konservasi, lahan menjadi berfungsi lindung, atau menjadi berfungsi prooduksi harus dibangun oleh setiap kalangan perorangan, kelompok atau institusi. Kalau suatu kawasan diakui sebagai hutan maka benar-benar hutan, tidak lagi menunjukkan hutan tapi kenyataannya gundul, atau areal terbuka. Ini yang disebut kebohongan publik. Sehingga ke depan tidak

perlu lagi ada hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi. Kalau memang suatu areal adalah hutan, maka itulah hutan yang harus dijaga oleh semua orang, kelompok atau lembaga. Maka yang namanya Tata Guna Tanah, Tata Ruang atau Tata Hutan sudah saatnya harus dibuat menjadi sebuah rangkaian bahasan atau pola pikir. Sehingga kedepan lebih dibutuhkan adanya Ecological atau Ecosystem Landscape, yang harus dijiwai oleh seorang pemimpin atau Kepala Negara dan Kepala Daerah. Belum ada pemimpin yang bervisi dan berpikiran seperti ini. Merangkai Indonesia Raya baru merupakan membangun tatanan tata ruang, tata guna tanah dan tata hutan yang baru dalam satu nafas Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS), tidak berjalan sendiri-sendiri. Bukan hanya berupa kuasa pengetahuan yang hanya berujung pada wacana dan perdebatan. Dunia pemerintahan dan non pemerintahan ke depan saya kira harus kembali diarahkan kesana, otomatis stanza sebagai Negara Agraris harus menjadi karakter dan sikap anak-anak bangsa. Gagalnya ago-industri diakibatkan karena kita tidak memperkuat cita-cita negara agraris, sehingga leleceh dari cita-cita *founding fathers*. Hanya dengan cara seperti ini, Reforma Agraria dapat berjalan mulus karena dikondisikan oleh kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah.

Kedua, Integrasi Kelembagaan Tri-darma Riset, Pendidikan dan Penguatan masyarakat. Peneliti dari berbagai Kementerian/Lembaga perlu dibawah satu payung lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara/Presiden dan seterusnya Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah harus menjadi Pimpinan Dewan Riset. Statemen Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan hasil riset dari anggaran 26 Triliyun Anggaran Negara

LAGU KEBANGSAAN

merupakan belum diujainya riset dan dikti oleh seorang Presiden, padahal dari sektor inilah semua urusan reformasi birokrasi total dapat diwujudkan. Terkait perilaku koruptif, Kepala Negara belum mampu membongkar birokrasi sehingga dibikin seperti kucing-kucingan oleh iklim kepemimpinan birokrasi yang membatu terhadap perubahan karena kepemimpinan saat ini masih bermuatan kepentingan partai politik masih sangat kuat sehingga arah birokrasi kita agak semrawut.

Sulit memperbaiki iklim kepemimpinan legislatif saat ini karena wakil rakyat di DPR RI bukan wakil rakyat, tetapi wakil Partai bahkan berkolusi dengan Eksekutif yang juga beraroma Partai Politik dalam melaksanakan tugas menyusun perundangan, menyusun anggaran dan mengawasi jalannya pembangunan. Legislatif saat ini sedang tidak berada dalam posisi melayani rakyat dan melaksanakan pembangunan, dan tidak mungkin dalam pikirannya ada kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, tetapi melayani pimpinan Partai-partai politik. Harapan ini yang menyulitkan eksekutif yang juga melayani Pimpinan Partai Politiknya karena Menteri-menterinya juga melayani Partai politiknya masing-masing. Sebuah iklim penyelenggaraan negara yang buruk, sehingga fungsi-fungsi kritis untuk sebuah perubahan dan pola pikir maju sudah diambil alih secara de-facto oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) atau NGO, sementara lain Organisasi Kemasyarakatannya sudah relatif lumpuh dan tidak lagi cerdas membawa aspirasi masyarakat. Adanya peran CSO harus dapat mengembalikan harmonisasi hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam hal ini tidak bisa kita pungkiri peran Presiden Soeharto dalam menata birokrasi pemerintahan di masa Orde Baru, hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif berjalan dengan baik dengan kapasitas kepemimpinan

LAGU KEBANGSAAN

yang tinggi, akan tetapi karena terlalu lama maka lemah dalam menampung dinamika perubahan yang terjadi.

Peneliti dibawah payung birokrasi menghambat proses inovasi pembangunan berupa terobosan kebijakan yang urgen dan mendesak dilaksanakan sebagaimana tuntutan Presiden Joko Widodo dengan jargon kerja kerja edan kerja, tidak didukung oleh lingkaran birokrasi pemerintahannya, yang ada malah tetap saja rapat rapat dan rapat yang tidak menyelesaikan permasalahan konflik dan kucing-kucingan itu, bahkan peneliti yang kerja pebuh dedikatif dan inovatif menjadi terperangkap di dalam kurung batok birokrasi. Sejak memasuki era reformasi hingga saat ini, justru Reformasi Birokrasi yang belum dilakukan, sehingga karena sudah hampir 20 tahun reformasi belum juga dilakukan, maka saatnya untuk periode 2019 – 2024 mendatang diperlukan Reformasi Birokrasi Total atau bisa disebut Revolusi Birokrasi. Peneliti di lembaga Perguruan Tinggi harus semakin terintegrasi dalam mendesain sebuah riset dan inovasi dengan peneliti di Kementerian/Lembaga sehingga dapat menjembatani antara pemegang kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar di lapangan. Disinilah posisi penting Prof HAKA dalam merangkai kembali kekuatan SDA dan LH yang berserakan merebut kembali tanah air Indonesia yang sakti

Ketiga, Integrasi Kelembagaan Agraria/Tata Guna Tanah, Tata Ruang dan Tata Guna Hutan sebagai tindak lanjut dari Kebijakan One Map Policy, sebagai kelanjutan dari kebijakan yang masih tahap awal dan Pepres Reforma Agraria yang masih baru menyentuk unsur kulit luar dari inti permasalahan. Konflik antar sektor penguasaan lahan, ruang dan hutan, konflik antar pusat-daerah, konflik masyarakat dengan pemerintah/pemerintah daerah, konflik antara perusahaan

LAGU KEBANGSAAN

dengan perusahaan (tumpang tindih perijinan) swasta/BUMN/BUMD, konflik antara sesama masyarakat adat/setempat/pendatang akibat tidak ada koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) dalam pelaksanaan peraturan perundangan dan kebijakan mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, desa dan operasional di lapangan. Bekerjanya mesin birokrasi sektor yang sendiri-sendiri tidak akan melahirkan aturan dan kebijakan yang efektif, inovatif dan kreatif bagi konstituen pembangunan yaitu masyarakat, bahkan hanya menimbulkan konflik2 dimana-mana seperti terjadi saat ini.

Ke-empat, penguatan regionalisasi wilayah pembangunan sejalan dengan konsep kebijakan desentralisasi terhadap pelaksanaan UUPA no. 5 tahun 1960, UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 dan UU No 26 tentang Penataan Ruang tahun 2009 dalam bentuk ecosystem Landscape, dimana Kepala Daerah merupakan penanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestarian sumberdaya lahan dari hulu (berupa aregal pegunungan/hutan), lahan tambang, perkebunan, pertanian/pangan, perdesaan, perkotaan dan hilirnya (lautan). Sehingga kedepan lebih hampir dikatakan tidak ada atau langka seorang Kepala Daerah yang memiliki visi dan kemauan (will) politik ekologi yang kuat (political ecology). Sehingga amatlah logis juga ke depan ada Kementerian Pergunungan (karena hutan pasti adanya di bukit-bukit dan pegunungan), Kementerian Pertanian (Tanaman Perakayuan, Perkebunan, Buah-Buahan, Sayuran dan Pangan), Kementerian Pertanahan/Agraria dan Pemanfaatan Ruang (Pencatatan Darat dan Laut) dan Kementerian Kelautan. Dan yang pasti hutan itu adanya di gunung yang harus kita jaga, tidak seperti sekarang, ada wilayah lembah di puncak gunung tapi fungsinya hutan dan ada juga areal persawahan tapi dia masuk kawasan hutan.

LAGU KEBANGSAAN

Umumnya hanya menunggu terjadinya bencana alam dan korban-korban kemanusiaan. Pola pikir ini yang harus dijiwai oleh seorang pemimpin nasional dan pemimpin daerah.

Semoga Buku ini menyadarkan semua pihak dan melahirkan para pejuang baru yang bekerja secara zig-zag atau out of the box terutama kalangan pimpinan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif di pusat dan daerah, dunia usaha, para aktivis pendidikan tinggi (scholars activists) di berbagai disiplin ilmu, peneliti di birokrasi (peneliti birokrasi), para aktivis CSO/NGO yang merupakan pelopor dalam gerak perubahan dalam proses penyelenggaraan negara, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan menginisiasi ikhtiar untuk bekerja membawa perbaikan-perbaikan sebagaimana diinginkan oleh Prof HAKA.

Dengan demikian kita dapat merangkai kembali stanza-stanza lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam mengelola SDA dan lingkungan kita dengan alunan dirijen yang tertata dengan baik dan rapi, berupa Good Governance dengan dukungan aparat/tenaga yang handal, benar, jujur, penuh pengabdian dan bersih atau clean government.

Cikini Jakarta Pusat, 2 Nopember 2018

Ismatul Hakim

Peneliti P3SEKPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

LAGU KEBANGSAAN

HARIADI KARTODIHARDJO

